



Pengaruh Good Governance Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo

Erna¹, Iwan Mamminanga², Andi Renilda Filyandini³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Puangrimaggalatung

Abstract. *Good governance is always related to a job, especially good quality work. Government organizations are expected to be able to provide quality work and good quality, so that there is good work performance.*

The type of research used is census research where research takes all members of the population as respondents (data source) and uses a questionnaire as the main data collection tool. By using a quantitative approach and using descriptive methods to determine the effect of good governance on employee performance at the Majuleng District Office, Wajo Regency.

The results of the analysis of research data on Good Governance and Work Performance, that Good Governance at the Majauleng District Office is in the good category. Likewise with the Job Performance variable which is in the good category. The influence of the good governance variable on work performance is in the very strong and positive category with significant data.

It can be concluded from the results of the study entitled the influence of Good Governance on work performance as follows: Good Governance at the Majuleng District Office, Wajo Regency, is in the good category. The work performance of the employees of the Majauleng District Office, Wajo Regency, is in the very good category. The results of the data analysis show that the influence given is a very strong influence with a positive and significant relationship.

Keywords: *Good Governance and Work Performance*

Abstrak. *Good governance selalu berhubungan dengan suatu pekerjaan, terutama kualitas pekerjaan yang baik. Organisasi pemerintah diharapkan bisa memberikan kualitas pekerjaan dan mutu yang baik, sehingga adanya prestasi kerja yang baik.*

Jenis penelitian yang digunakan penelitian sensus dimana penelitian yang mengambil semua anggota populasi sebagai responden (sumber data) dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui adanya pengaruh Good Governance terhadap prestasi kerja pegawai pada Kantor Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.

Hasil analisis data penelitian tentang Good Governance Dan Prestasi Kerja, bahwa Good Governance pada Kantor Kecamatan Majauleng dalam kategori baik. Begitu pula pada variabel Prestasi Kerja yang berada pada kategori baik. Pengaruh yang dihantarkan

variabel Good Governance terhadap Prestasi Kerja berada pada kategori sangat kuat serta positif serta data yang signifikan.

Kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul pengaruh Good Governance Terhadap Prestasi kerja sebagai berikut Good Governance pada Kantor Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo berada pada kategori baik. Prestasi Kerja Pegawai Kantor Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo berada pada kategori sangat baik. Hasil analisi data menunjukkan pengaruh yang diberikan adalah pengaruh yang sangat kuat dengan arah hubungan yang positif dan signifikan.

Kata kunci: Good Governance dan Prestasi Kerja

LATAR BELAKANG MASALAH

Good governance atau dikenal dengan istilah tata pemerintahan yang baik. Good governance berasal dari dua kata yang diambil dari Bahasa Inggris, yaitu good dan governance. Good memiliki arti nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional, serta pemerintahan yang efektif dan efisien. Sementara governance (tata pemerintahan) memiliki arti seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, serta menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Era 1990-an, dimana proyek demokratisasi (yang sudah dimulai dekade 1980-an) berkembang luas seantero jagad. Pada era ini muncul cara pandang baru terhadap pemerintahan, yang ditandai munculnya governance dan good governance. Sejumlah lembaga donor seperti IMF dan World Bank (Bank Dunia) dan para praktisi pembangunan internasional yang justru memulai mengembangkan gagasan governance dan juga good governance. Istilah governance sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120-an tahun, terutama oleh Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27.

Kemunculan good governance di Indonesia, karena kebijakan pemerintah yang berorientasikan pembangunan semasa Orde Baru, dukungan Bank Dunia dan IMF. Bank Dunia sendiri dalam mempromosikan good governance di Indonesia melalui tiga pintu yaitu CGI (Consultative Group on Indonesia), Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership for Governance Reform) dan Justice for the Poor. Di Indonesia, isu governance mulai memasuki arena perdebatan pembangunan yang didorong oleh adanya

dinamika menuntut perubahan baik dari sisi pemerintah maupun warga. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan, sehingga good governance diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan sekitar 20-an tahun belakangan. Penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim good governance yang baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Good Governance

Suatu tata pemerintahan atau Governance dilihat dari tata cara pengelolaan yang tersusun rapih, Governance atau Tata Pemerintahan yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip yang kemudian dikenal dengan Tata Pemerintahan yang Baik. Secara harfiah Governance menurut Daniri (2006) kerap diterjemahkan sebagai “pengaturan”. Menurut Sadjijono (2007), good governance mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara.

Good governance merupakan tata kelola dalam suatu pemerintahan yang meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. Sumber lain mendefinisikan good governance adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi.

Good governance sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Menurut World Bank dalam Mardiasmo (2009:18) mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi,

dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Prinsip-Prinsip Good Governance

Menurut UNDP ada 14 prinsip Good Governance, yaitu: 1) Wawasan terdepan (Visionary), 2) Keterbukaan dan transparansi (Openess and Transparency), 3) Partisipasi (Participation), 4) Tanggung Jawab (Accountability), 5) Aturan Hukum (Rule of Law), 6) Demokrasi (Democracy), 7) Profesionalisme dan kompetensi (Profesionalism and Competency), 8) Daya tanggap (Responsiveness), 9) Efisien dan efektif (Efficiency and Effectiveness), 10) Desentralisasi (Decentralization), 11) Bermitra terhadap dunia usaha swasta dan masyarakat (Private Sector and Civil Society Partnership), 12) Berkomitmen dengan pengurangan kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality), 13) Berkomitmen dengan lingkungan hidup (Commitment to Environmental Protection), 14) Berkomitmen untuk pasar yang fair (Commitment to Fair Market) Pendapatan Asli Daerah.

Penilaian Prestasi Kerja

Penilaian Prestasi Kerja merupakan sarana untuk memperbaiki pegawai yang tidak melakukan tugasnya dengan baik didalam organisasi. Setiap organisasi selalu mengharapkan memperoleh pegawai yang memilik prestasi kerja yang baik. Oleh sebab itu organisasi selalu melakukan penilaian prestasi kerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerja pegawainya selama periode waktu tertentu, apakah terjadi peningkatan atau bahkan terjadi sebaliknya.

Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang pegawai melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, Mangkunegara (2015 : 48). Menurut Simamora (2004 : 415) ada tiga hal yang dimasukkan dalam penilaian prestasi kerja yaitu tingkat kedisiplinan, tingkat kemampuan, serta perilaku inovatif dan spontan. Pegawai Negeri Sipil melakukan penilaian prestasi kerja sesuai dengan PP No 46 Tahun 2011.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang ditentukan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu di Kantor Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.

Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan tiga bulan setelah selesainya seminar proposal.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian sensus dimana penelitian yang mengambil semua anggota populasi sebagai responden (sumber data) dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui adanya pengaruh good governance terhadap prestasi kerja pegawai pada Kantor Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan, memaparkan atau menggambarkan dari apa yang dilihat, diperoleh dan yang dirasakan. “Masyhuri (2008) menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu”. Pendekatan kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel dan melakukan generalisasi fenomena sosial yang di teliti.

Sugiyono (2013) pengertian metode survey yaitu penelitian yang digunakan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis”.

Populasi dan Sampel

Populasi

“Populasi, adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Riduwan dan Kuncoro, 2007:37). Berdasarkan pernyataan ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian, atau populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pegawai yang berjumlah 25 orang yang terdiri dari 13 orang PNS dan 12 orang PTT.

Sampel

Pengertian dari sampling jenuh atau sensus menurut Sugiyono (2008:122), adalah: “Sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”.

Memperhatikan pernyataan tersebut, karena populasi 25 (dua puluh lima) orang dan seluruhnya masih dapat dijangkau oleh penulis, maka diputuskan semua anggota populasi tersebut dijadikan sebagai responden dengan teknik sampel total (sampel jenuh).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Profil Singkat Kecamatan Majauleng

Kecamatan Majauleng adalah satu dari empat belas kecamatan yang berada di Kabupaten Wajo. Luas Wilayah Majauleng sebesar 225,92 km² atau 9,01 persen dari luas Kabupaten Wajo. Kecamatan ini berpusat di Kelurahan Paria. Wilayah Majauleng tidak berbatasan langsung dengan pantai dan berada pada ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Majauleng berbatasan dengan Kecamatan Sajoanging dan Kecamatan Penrang di sebelah Timur, Kecamatan Tanasitolo di sebelah barat. Kecamatan Pammana di sebelah selatan dan Kecamatan Gilireng di sebelah utara. Sekitar 55,77 persen lahan di wilayah Majauleng merupakan lahan persawahan, sedangkan sisanya 44,23 persen

merupakan lahan kering. Lahan persawahan di kecamatan ini mayoritas merupakan sawah tadah hujan yaitu sebanyak 86,11 persen.

Kantor Kecamatan Majauleng terletak di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kecamatan Majauleng terdiri dari 14 Desa dan 4 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Paria
2. Kelurahan Lompomajang
3. Kelurahan Macanang
4. Kelurahan Uraiyang
5. Desa Tosora
6. Desa Cinnong Tabi
7. Desa Rumpia
8. Desa Laerung
9. Desa Lamiku
10. Desa Botto Benteng
11. Desa Botto Tanre
12. Desa Tua
13. Desa Tajo
14. Desa Tengnga
15. Desa Liu
16. Desa Tellu Limpoe
17. Desa Botto Penno
18. Desa Watanrumpia

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran tentang penjelasan fungsi dari setiap bagian sumber daya manusia yang ada dalam sebuah organisasi pemerintah atau swasta dan memberikan informasi terkait isi dalam organisasi tersebut. Maka tidak heran jika struktur organisasi merupakan bagian terpenting dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi dalam lokasi penelitian adalah instansi Negara (Kecamatan Majauleng) yang selanjutnya ada pada lampiran.

b. Visi Dan Misi

Visi :

“Mewujudkan Kecamatan Majauleng yang Amanah, Demokratis dan Religius dalam Pelayanan Pemberdayaan”

Misi :

1. Mewujudkan pelayanan publik prima;
2. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Majauleng secara efektif dan akuntabel;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan kecamatan;
4. Meningkatkan hubungan timbal balik pemerintahan desa/kelurahan dan pemerintahan kecamatan;
5. Meningkatkan kerukunan dan ketertiban dan kenyamanan Masyarakat.

c. Tugas, Fungsi Dan Wewenang

Kantor Kecamatan Majauleng memiliki struktur organisasi menurut peraturan Bupati Wajo no. 81 Tahun 2016. Pengelolaan tenaga kerja di Kantor Kecamatan Majauleng terdiri dari Camat, Sekretaris, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Perekonomian dan Pembangunan.

1) Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2) Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas membantu Camat dalam Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan data, pelaporan, bahan perumusan rencana program, keuangan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada Camat dan semua unsur di lingkungan Kecamatan.

3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, sistem informasi Kecamatan, dan administrasi keuangan.

4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja.

5) Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, administrasi kependudukan dan pembinaan politik dalam negeri.

6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan, desa/kelurahan, sosial, peningkatan sarana prasarana fasilitas umum serta lingkungan hidup.

7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat dalam perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penegakan produk hukum daerah, pengendalian ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan

Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kecamatan serta pembinaan kemandirian dan partisipasi politik masyarakat.

8) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, peranan wanita, keluarga berencana dan pelayanan kesehatan.

9) Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi dan distribusi, pelestarian lingkungan hidup dan swadaya masyarakat.

2. Analisis Data Penelitian

a. Dekripsi Data Variabel

Deskripsi data variabel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang jawaban atau tanggapan dari responden yang kemudian diolah oleh program SPSS Versi 26 sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel .1 : Deskripsi Distribusi Frekuensi Data Varibel

		Statistics	
		Good Governance	Pretasi Kerja
N	Valid	25	25
	Missing	0	0
Mean		33,12	49,92
Median		33,00	50,00
Mode		31	50
Std. Deviation		2,489	3,108
Variance		6,193	9,660
Range		10	10
Minimum		28	45
Maximum		38	55
Sum		828	1248

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada variabel *Good Governance* (X) dan Prestasi Kerja (Y) menunjukkan N (Jumlah Sampel) valid sebesar 25 dan tidak ada data pengamatan yang hilang dengan hilang dengan nilai missing yang bernilai 0. Selanjutnya, nilai rata-rata (Mean) pada variabel X sebesar 33,12, sedangkan nilai rata-rata (Mean) pada variabel Y sebesar 49,92, nilai tengah (Median) variabel X sebesar 33,00, sedangkan nilai tengah (Median) Variabel Y 50,00, nilai yang sering muncul (Mode) Variabel X 31, sedangkan nilai yang sering muncul (Mode) Variabel Y sebesar 50, dengan nilai simpan Baku (std deviation) Variabel X 2,489, sedangkan nilai simpan Baku (std deviation) Variabel Y sebesar 3,108, nilai Variance Variabel X 6,193, dan nilai Variance Variabel Y adalah 9,660, rentang nilai Range Variabel X dan Y adalah 10, nilai terendah Variabel X sebesar 28, nilai terendah Variabel Y 45, nilai tertinggi Variabel X 38, nilai tertinggi Variabel Y sebesar 55, dengan nilai total masing-masing Variabel X dan Y adalah 828 dan 1.248.

b. Skala Butir Atau Skala Likter

Skala butir dimaksudkan untuk mengetahui hasil dari butir-butir pertanyaan pada setiap dimensi yang ada pada variabel *Good Governance* (X) dan variabel Prestasi Kerja (Y).

1) *Good Governance* (X)

Dalam variabel *Good Governance* terdapat empat dimensi yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan Aturan Hukum dengan delapan item pertanyaan yang masing-masing dari dimensi tersebut dua item pertanyaan. Selanjutnya hasil yang di dapat sebagai berikut :

Tabel .2 : Deskripsi Skor Butir Pertanyaan Variabel

NO	Skor Yang Diperoleh	Skor Ideal	Kriteria	Cacatan	
1	114	125	Sangat Baik	Skor yang diperoleh adalah jumlah skor setiap butir pertanyaan. Skor ideal nilai tinggi dikali nilai responden (5x25)= 125.	
2	106	125	Sangat Baik		
3	106	125	Sangat Baik		
4	109	125	Sangat Baik		
5	103	125	Baik		
6	96	125	Baik	Interval	Klasifikasi Sikap
7	92	125	Baik	>105 – 125	Sangat Baik
8	102	125	Baik	>85 – 105	Baik
Σ	828	1.000	Baik	>65 – 85	Cukup Baik
				>45 – 65	Kurang Baik
				25 – 45	Tidak Baik
				Eko Putro Widoyoko (2012:110)	

Eko Putro Widoyoko (2012:110)

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat di peroleh informasi dari responden tentang variabel *Good Governances* secara umum termasuk dalam kriteria baik. Data ini di dukung dari temuan peneliti bahwa pada item pertanyaan 1, 2, 3, dan 4 berada dalam kriteria sangat baik sedangkan 5, 6, 7, dan 8 berada pada kriteria baik.

2) Prestasi Kerja (Y)

Dalam variabel Prestasi Kerja terdapat enam dimensi yaitu Hasil Kerja, Pengetahuan Pekerjaan, Inisiatif, Kecakatan Mental, Sikap, Displin Waktu dan Absensi dengan enam item pertanyaan. Dengan dua item pertanyaan di setiap dimensi. Selanjutnya hasil yang di dapat sebagai berikut:

Tabel .3 : Deskripsi Skor Butir Pertanyaan Variabel (Y)

NO	Skor Yang Diperoleh	Skor Ideal	Kriteria	Cacatan	
1	114	125	Sangat Baik	Skor yang diperoleh adalah jumlah skor setiap butir pertanyaan. Skor ideal nilai tinggi dikali nilai responden (5x25)= 125.	
2	106	125	Sangat Baik		
3	106	125	Sangat Baik		
4	109	125	Sangat Baik		
5	103	125	Baik	Interval	Klasifikasi Sikap
6	100	125	Baik	>105 – 125	Sangat Baik
7	108	125	Sangat Baik	>85 – 105	Baik
8	102	125	Baik	>65 – 85	Cukup Baik
9	106	125	Sangat Baik	>45 – 65	Kurang Baik
10	106	125	Sangat Baik	25 – 45	Tidak Baik
11	100	125	Baik	Eko Putro Widoyoko (2012:110)	
12	108	125	Sangat Baik		
Σ	1.268	1.500	Sangat Baik		

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat di peroleh informasi dari responden tentang variabel Prestasi Kerja secara keseluruhan termasuk dalam kriteria baik. Data ini di dukung dari temuan peneliti bahwa item pertanyaan 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, dan 12 berada dalam kriteria sangat baik. Sedangkan untuk item pertanyaan 5, 6, 8, dan 11 berada dalam kriteria baik.

c. Analisi Korelasi

Untuk melihat hubungan pengaruh antar kedua variabel, Varibel *Good Governance* dan Variabel Prestasi Kerja maka di gunakan teknik analisis korelasi sederhana. Selanjutnya hasil data kedua variabel yang sudah diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 26 :

Tabel .4 : Korelasi

Correlations			
		Good Governance	Pretasi kerja
Goodgovernance	Pearson Correlation	1	,885**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	25	25
Pretasikerja	Pearson Correlation	,885**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	25	25
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).			

Sebagaimana data pada tabel di atas nilai *Pearson Correlation* sebesar 0,885 yang artinya variabel (x) yakni *Good Governance* memiliki hubungan yang sangat kuat dengan variabel (y) yakni Pretasi Kerja. Selanjutnya untuk melihat besar kecilnya kontribusi yang di hasilkan dengan menggunakan Aplikasi SPSS versi 26, maka hasilnya sebagai berikut:

Tabel .5 : Model Summary

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,885 ^a	,783	,773	1,480
a. Predictors: (Constant), Goodgovernance				

Dari hasil perhitungan diatas di peroleh nilai (R) 0,885 nilai ini berada pada rentang atau interval 0,799 – 1.000 sehingga hubungan yang di hasilkan dapat dikatakan kuat dan berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan nilai dari R Square sebesar 0,783 atau 78,3%, yang menunjukkan presentase sumbangan pengaruh variabel (x) *Good Governance* kepada variabel (y) Prestasi Kerja sebanyak 78,3% sedangkan sisanya 21,7 %, di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

d. Analisis Regresi Sederhana

Untuk Mengetahui rumusan masalah pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Good Governance* terhadap Prestasi Kerja Pegawai, digunakanlah analisi regresi sederhana yang di olah dalam SPSS versi 26 dengan hasil seperti berikut :

Tabel .6 : Koefisien

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,324	4,031		3,306	,003
	Goodgovernance	1,105	,121	,885	9,104	,000
a. Dependent Variable: Pretasikerja						

Berdasarkan tabel diatas koefisen regresi dimana $Y=a+bx$ atau $Y= 13,324 + 1,105 x$, jika $x =0$ maka $y = 13,324$, sebaliknya jika nilai x dinaikan menjadi satu satuan maka nilai y bertambah menjadi 1,105.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang *Good Governance* dan Prestasi Kerja yang dijelaskan dan di uraikan secara rinci pada halaman sebelumnya, maka dapat di simpulkan untuk variabel *Good Governance* yang terdapat pada tabel 4.2 dengan hasil baik yang membuktikan bahwa *Good Governance* pada Kantor Kecamatan Majauleng dalam kategori baik. Begitu pula pada variabel Prestasi Kerja yang berada pada kategori baik sesuai dari temuan pada tabel 4.3. Pengaruh yang dihantarkan variabel *Good Governance* terhadap Prestasi Kerja berada pada kategori sangat kuat sebagai mana pada temuan tabel 4.4, dan arah hubungannya dapat kita lihat pada tabel 4.5 dengan model sumaray yaitu positif serta data yang signifikan. Penelitian ini tentunya di perkuat dengan teori yang tergambar pada kerangka pikir.

Menurut Sedarmayanti (2013) ada 4 prinsip penting *Good Governance* beserta indikator-indikator menurut Sedarmayanti (2013) adalah :

1. Indikator Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan bila terjadi kelalaian dalam pelayanan, menjalankan prosedur dan mekanisme kinerja organisasi, petugas pemberi layanan lebih mendahulukan kepentingan masyarakat
2. Indikator Transparansi yaitu memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam memberikan aspirasi mengenai pelayanan yang ada di Desa, memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam mengakses informasi pelayanan, memiliki pengaduan prosedur apabila penyampaian informasi tidak sampai ke publik.
3. Indikator Partisipasi yaitu setiap kebijakan pelayanan harus berdasarkan pada kesepakatan bersama masyarakat seperti dalam musyawarah., keterlibatan masyarakat dalam kritik maupun saran untuk mewujudkan kinerja pelayanan yang lebih baik, pelibatan masyarakat untuk bersosialisasi.
4. Indikator Aturan Hukum yaitu adanya aturan mengenai kepastian pemberian layanan, adanya standar operasional prosedur (SOP) bagi petugas pemberi layanan, adanya reward and punishment bagi pelaksana pelayanan.

Menurut Hasibuan (2011:94) : “Bahwa prestasi kerja sebagai suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta disiplin waktu kerja.”

Adapun indikator prestasi kerja menurut Sutrisno (2014:152) dalam Widyawaty Mashar (2015) sebagai berikut:

1. Hasil Kerja

Tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah dihasilkan dan sejauh mana pengawasan dilakukan.

2. Pengetahuan Pekerjaan

Tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas pekerjaan yang akan berpengaruh langsung terhadap kuantitas dan kualitas dari hasil kerja.

3. Inisiatif

Tingkat inisiatif selama melaksanakan tugas pekerjaan khususnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang timbul.

4. Kecekatan Mental

Tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima instruksi kerja dan menyelesaikan dengan cara kerja serta situasi kerja yang ada.

5. Sikap

Tingkat Prestasi Kerja serta sikap positif dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

6. Disiplin Waktu dan Absensi

Tingkat ketepatan waktu dan tingkat kehadiran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh *Good Governance* terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Good Governance* pada Kantor Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo berada pada kategori baik.
2. Prestasi Kerja Pegawai Kantor Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo berada pada kategori sangat baik.
3. Hasil analisis data menunjukkan pengaruh yang diberikan adalah pengaruh yang sangat kuat dengan arah hubungan yang positif dan signifikan.

Saran

1. Camat

Senantiasa memberikan perhatian dan pelayanan yang prima kepada masyarakat, dan tak lupa menjalankan kewajiban serta menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

2. Pegawai

Lebih memperhatikan masyarakat yang dilayani dan bertindak sopan dan santun dalam prose pelayanan khususnya kepada masyarakat serta tidak membedakan.

3. Peneliti

Sebagai ilmu dan pengetahuan baru sekaligus untuk bahan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Setyorini, D. (2016). Profil Pemecahan Masalah Sub Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel Pada Siswa Kelas Ix Mtsn 1 Jember Dengan Tahapan Polya Ditinjau Berdasarkan Adversity Quotient (AQ).
- Hermansyah, I., Rahman, R., & Suherman, M. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Survei Pada Dinas Daerah Kotatasmalaya). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 21-29.
- Masyhuri (2008) menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu”.
- Masyhuri, M. (2008). English Department Students’ Skill in Deriving Verb from Noun by Using Affixes.
- Mulyadi, D., & Syafitri, A. (2015). Pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di Bank BJB Syariah cabang Bogor. *Jurnal Ilmiah Binaniaga*, 11(2).
- Mustofa, I. (2007). Mengawal Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dengan Penegakan Hukum. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 181-194.
- Nasution, H. F. (2016). Instrumen penelitian dan urgensinya dalam penelitian kuantitatif. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 4(1), 59-75.
- Nuraini, S. (2020). Penerapan etika administrasi publik sebagai upaya dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 14(1).
- Nurdiana, D. (2013). Pengaruh Kedisiplinan Belajar Dan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas VIII SMP Negeri 30 Purworejo Tahun Pelajaran 2012/2013 (Doctoral dissertation, Pend. Ekonomi).
- Pangestu, A., Siregar, M. Y., & Lailikhatmisafitri, I. (2020). Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Human Relations (Hubungan Antar Manusia) Terhadap Kinerja Karyawan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis (JIMBI)*, 1(1), 1-10.
- Ramadan, M. A. (2022). Tinjauan Pengembangan Kawasan Permukiman Di Belopa Ibukota Kabupaten Luwu.
- Sari, R. N. (2018). Pengaruh Atribut Produk, Kualitas Layanan dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen Rumah Makan di Pantai Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.
- Sohibun, S., & Ade, F. Y. (2017). Pengembangan media pembelajaran berbasis virtual class berbantuan Google Drive. *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, 2(2), 121-129.

- Syairozie, Z. (2014). Pengaruh sistem pelaporan dan Good Governance terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten sumenep (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Talika, F. T. (2016). Manfaat Internet Sebagai Media Komunikasi Bagi Remaja Di Desa Air Mangga Kecamatan Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan. *Acta Diurna Komunikasi*, 5(1).